



PAPER – OPEN ACCESS

Studi Kelayakan UPT Puskesmas Z

Author : Wahyuda dkk.,
DOI : 10.32734/ee.v4i1.1280
Electronic ISSN : 2654-704X
Print ISSN : 2654-7031

Volume 4 Issue 1 – 2021 TALENTA Conference Series: Energy and Engineering (EE)



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/).

Published under licence by TALENTA Publisher, Universitas Sumatera Utara



Studi Kelayakan UPT Puskesmas Z

Wahyuda^a, Farida Djumiati Sitania^a, Rama Abdi Wicaksana^{a*}

^aProdi Teknik Industri, Fakultas Teknik, Universitas Mulawarman, Jalan Sambaliung No. 9, Samarinda 75119, Indonesia

wahyuda@gmail.com, ida.sitania@gmail.com, ramaabdiw7@gmail.com

Abstrak

UPT Puskesmas Z merupakan lembaga pelayanan masyarakat yang berperan dalam menyediakan pelayanan jasa kesehatan kepada masyarakat khususnya kepada masyarakat Kecamatan Bongan yang sudah beroperasi sejak Tahun 2017. UPT Puskesmas Z memerlukan studi kelayakan sebagai salah satu syarat untuk melakukan pembangunan serta untuk memaksimalkan kegiatan operasional. Berdasarkan hal tersebut maka penelitian ini meneliti tentang studi kelayakan UPT Puskesmas Z yang berlandaskan pada Permenkes nomor 75 tahun 2014 tentang puskesmas. Selain meneliti studi kelayakan penelitian ini juga membuat rancangan puskesmas yang memenuhi standar studi kelayakan yang dirancang dilahan yang sama dengan UPT Puskesmas Z. Pada rancangan puskesmas ada beberapa perubahan dan perbedaan dengan UPT Puskesmas Z yaitu penambahan jumlah ruangan, penambahan lebar ruangan, tata letak ruangan dan penambahan fasilitas. Berdasarkan hasil studi kelayakan yang dilakukan pada UPT Puskesmas Z, maka diketahui pada aspek lokasi memenuhi 6 kriteria dari 8 kriteria dan 2 kriteria tidak memenuhi standar kelayakan yaitu fasilitas keamanan dan fasilitas parkir. Pada aspek bangunan memenuhi 4 kriteria dari 6 kriteria dan 2 kriteria tidak memenuhi standar kelayakan yaitu jumlah ruang dan lambang. Pada aspek sarana dan prasarana memenuhi 6 kriteria dari 10 kriteria dan 4 kriteria tidak memenuhi standar kelayakan yaitu sistem komunikasi, sistem pencahayaan, sistem proteksi petir, dan sistem proteksi kebakaran. Pada aspek peralatan kesehatan hanya memenuhi 22% dari jumlah keseluruhan standar peralatan kesehatan puskesmas. Pada aspek ketenagaan memenuhi 7 kriteria dari 10 kriteria dan 3 kriteria tidak memenuhi standar kelayakan yaitu dokter pelayanan primer, dokter gigi dan tenaga gizi. Pada aspek organisasi telah memenuhi standar studi kelayakan.

Kata Kunci: Puskesmas; UPT Puskesmas Z; Studi Kelayakan; Permenkes.

Abstract

UPT Puskesmas Z is a community service institution that plays a role in providing health services to the community, especially to the people of Bongan District which has been operating since 2017. UPT Puskesmas Z requires a feasibility study as one of the requirements to carry out development and to maximize operational activities. Based on this, this research examines the feasibility study of UPT Puskesmas Z which is based on Permenkes number 75 of 2014 concerning puskesmas. In addition to researching the feasibility study, this research also made a puskesmas design that meets the standards of a feasibility study designed in the same area as the UPT Puskesmas Z. In the design of the puskesmas there are several changes and differences with the UPT Puskesmas Z, namely the addition of the number of rooms, the addition of the width of the room, the layout of the rooms and the addition of facilities. Based on the results of the feasibility study conducted at the UPT Puskesmas Z, it is known that the location aspect fulfills 6 out of 8 criteria and 2 criteria do not meet the eligibility standards, namely security facilities and parking facilities. In the building aspect, 4 out of 6 criteria are met and 2 criteria do not meet the eligibility standards, namely the number of spaces and symbols. In the aspect of facilities and infrastructure, 6 out of 10 criteria are met and 4 criteria do not meet the eligibility standards, namely communication systems, lighting systems, lightning protection systems, and fire protection systems. In the aspect of health equipment, it only fulfills 22% of the total standard for health equipment at the puskesmas. In the labor aspect, 7 out of 10 criteria and 3 criteria do not meet the eligibility standards, namely primary care doctors, dentists and nutrition workers. In the organizational aspect, it has met the feasibility study standard.

Keywords: Public Health Center; UPT Puskesmas Z; Feasibility Study; Minister of Health Regulation.

1. Pendahuluan

1.1 Latar Belakang

Kesehatan merupakan hak dan investasi semua orang. Menurut Irmawati (2017)^[1] dalam rangka menjamin kesehatan dibutuhkan sebuah sistem yang bisa mengatur pengadaan pelayanan kesehatan masyarakat dalam usaha memenuhi keperluan warga untuk menjaga kesehatan. Layanan kesehatan yang memenuhi syarat merupakan landasan masyarakat dan merupakan salah satu kebutuhan paling dasar selain pangan dan pendidikan. Diharapkan masyarakat dapat memperoleh layanan kesehatan secara bertanggung jawab, aman, berkualitas, adil dan tidak diskriminatif, sehingga hak pasien sebagai penerima layanan kesehatan terlindungi.

Saat ini, segala bidang sedang dibangun oleh pemerintah. Salah satu diantaranya ialah mengadakan pembangunan pada bidang kesehatan masyarakat. Perkembangan bidang kesehatan masyarakat harus segera ditindaklanjuti, karena banyaknya permasalahan kesehatan baik di perkotaan maupun pedesaan di Indonesia. Pembangunan sehat bertujuan agar setiap penduduk dapat hidup sehat, sehingga tercapai terciptanya derajat kesehatan masyarakat yang sebaik-baiknya. Kesehatan dapat didefinisikan sebagai tidak hanya bebas dari penyakit, kecacatan dan kelemahan, tetapi sebenarnya adalah kondisi sejahtera mental, fisik, dan sosial yang positif yang memungkinkan orang untuk hidup produktif.

Menurut Juwiring(2017)^[2] salah satu bentuk usaha pemerintah untuk mengadakan kesehatan kepada masyarakat ialah dengan membangun instansi pemerintah di setiap kecamatan sebagai unit pengadaan layanan kesehatan masyarakat, yakni Pusat Kesehatan Masyarakat atau yang biasa disebut Puskesmas. Menurut Agustini (2013)^[3] Puskesmas merupakan organisasi yang memberikan layanan kesehatan yang mengadakan pekerjaan kesehatan masyarakat dan kesehatan perorangan tingkat pertama, serta mengutamakan usaha pencegahan dan peningkatan dalam rangka memperoleh tingkat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya di wilayah kerja. Pemimpin masyarakat penyedia layanan kesehatan memainkan peran strategis yang sangat berpengaruh dalam upaya meningkatkan kesehatan masyarakat. Menurut Sardjoko (2018)^[4], fungsi Puskesmas adalah menyelenggarakan pelayanan kesehatan yang menyeluruh, menyeluruh, adil, dapat diterima dan terjangkau masyarakat dengan adanya partisipasi masyarakat dan pemanfaatan hasil pengaplikasian ilmu pengetahuan dan teknologi yang tepat guna. dapat ditanggung oleh masyarakat tanpa mengabaikan kualitas pelayanan kepada individu.

Pemerintah mendirikan sebuah Puskesmas di daerah kampung Jambuk yaitu UPT Puskesmas Z. Hal ini dilakukan sehubungan dengan keperluan masyarakat untuk memperoleh layanan kesehatan yang sesuai dengan ketentuan. UPT Puskesmas Z mulai beroperasi sejak Tahun 2017, kegiatan operasional UPT Puskesmas Z yang telah dilaksanakan meliputi kegiatan pelayanan kesehatan rawat jalan, pelayanan kesehatan gawat darurat (IGD), pelayanan penunjang diagnostik medis, pelayanan penunjang non medis berupa kegiatan/fasilitas air bersih, listrik, keamanan, pengolahan limbah padat baik medis, non medis maupun LB3, pengolahan limbah cair serta pelayanan administrasi. Dalam melaksanakan kegiatan operasional UPT Puskesmas Z harus memenuhi standar studi kelayakan operasional yang telah ditetapkan dalam Permenkes Nomor 75 tahun 2014 tentang Puskesmas.

Dalam permenkes nomor 75 tahun 2014 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat^[5] ada beberapa aspek yang harus dipenuhi dalam menjalankan kegiatan operasional sebuah Puskesmas yaitu aspek lokasi, aspek bangunan, aspek sarana dan prasarana, aspek peralatan kesehatan, aspek ketenagaan, dan aspek organisasi. Semua aspek tersebut harus dipenuhi agar UPT Puskesmas Z dapat beroperasi sesuai dengan ketentuan yang ada.

Oleh sebab itu, penelitian ini dilakukan studi kelayakan terhadap UPT Puskesmas Z, agar UPT Puskesmas Z tersebut dapat memenuhi persyaratan operasional puskesmas sesuai pada Permenkes Nomor 75 tahun 2014. Menurut Suratman(2001)^[6] jika objek studi kelayakan merupakan proyek yang tidak berorientasi profit maka studi kelayakan yang dimaksud adalah suatu studi tentang layak atau tidaknya proyek tersebut dikerjakan atau dilaksanakan tanpa mempertimbangkan keuntungan secara ekonomis Hasil dari penelitian ini merupakan sumber informasi dan acuan untuk mengadakan pembangunan serta pengembangan dalam pengaturan berbagai fasilitas dan jasa pelayanan puskesmas agar semakin berkualitas. Selain itu, hasil dari studi kelayakan ini juga digunakan sebagai salah satu syarat izin operasional.

Tujuan yang ingin diraih berdasarkan latar belakang yang disampaikan pada penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana rancangan puskesmas yang sesuai dengan Permenkes Nomor 75 Tahun 2014 dan memberikan rekomendasi perbaikan yang harus dilakukan oleh UPT Puskesmas Z

2. Metodologi Penelitian

2.1. Langkah-langkah Penelitian

Tahapan-tahapan yang dilakukan pada penelitian ini yaitu langkah persiapan, mengumpulkan data, mengolah data, analisis dan pembahasan serta langkah penutup. Penjelasan mengenai masing-masing tahap akan dijelaskan di bawah ini.

2.2. Langkah Persiapan

Langkah pertama yang perlu dilaksanakan pada penelitian ini adalah persiapan. Terdapat beberapa langkah pada tahapan ini, yaitu:

- **Studi Pendahuluan**
Pada tahap studi pendahuluan dilakukan dengan cara studi literatur tentang penelitian yang akan dilakukan yaitu terkait dengan studi kelayakan. Studi literatur yang akan digunakan yaitu Permenkes nomor 75 tahun 2014 tentang puskesmas dan penelitian sejenis yang berasal dari buku maupun literatur yang didapatkan melalui internet.
- **Identifikasi Masalah**
Pengidentifikasian masalah dilakukan berdasarkan hasil observasi yang dilakukan dan kemudian dapat diusulkan solusi dalam pemecahan masalah tersebut, yaitu mengidentifikasi spesifikasi/kelayakan pada UPT Puskesmas Z berdasarkan Permenkes nomor 75 tahun 2014 tentang puskesmas.
- **Penetapan Tujuan Penelitian**
Penetapan tujuan penelitian bergantung pada perumusan masalah yang telah ditentukan sehingga dapat membantu peneliti dalam mencapai hasil akhir yang diinginkan. Tujuan dari penelitian yang dilakukan adalah menganalisis kelayakan bangunan dan operasional pada UPT Puskesmas Z yang berdasarkan pada Permenkes nomor 75 tahun 2014 tentang puskesmas.

2.3. Pengumpulan Data

Pada langkah pengumpulan data, jenis data yang dikumpulkan terbagi atas dua. Data tersebut ialah data primer dan data sekunder. Berikut di bawah ini penjabarannya.

- **Data Primer**
Data primer ialah data yang didapatkan langsung atau tanpa ada perantara yang bersumber dari sumber aslinya. Data primer pada penelitian ini terbagi menjadi 2 (dua) yaitu, (1) Observasi merupakan aktivitas pengamatan langsung kepada objek yang diteliti. Observasi dilakukan untuk mengetahui kondisi secara langsung pada UPT Puskesmas Z. Data yang didapatkan pada observasi terdiri dari kriteria geografis, aksesibilitas transportasi, fasilitas parkir, fasilitas keamanan, kondisi lainnya, desain bangunan, kondisi ruangan, sistem penghawaan, sistem pencahayaan, sistem komunikasi, sistem gas medik, dan sistem proteksi kebakaran dan (2) Wawancara, selain melalui observasi yang dilakukan, wawancara juga dilakukan untuk mendapatkan data primer. Wawancara bertujuan untuk mengetahui kondisi secara langsung pada UPT Puskesmas Z. Wawancara dilakukan dengan kepala puskesmas. Wawancara bertujuan untuk memperoleh informasi yang tidak bisa diperoleh melalui pengamatan seperti, kondisi aksesibilitas transportasi, ketersediaan utilitas publik yang disediakan oleh pemerintah seperti sumber daya air, listrik, dan jalur telpon, pengelolaan kesehatan lingkungan dengan menyediakan IPAL serta pengelolaan limbah infeksius dan non infeksius, sistem penghawaan dan kondisi udara ruangan ketika kegiatan operasional dilakukan, sistem sanitasi, sistem pengendalian kebisingan.
- **Data Sekunder**
Data sekunder merupakan data yang didapatkan secara tidak langsung melainkan dari media perantara. Data sekunder pada penelitian ini dapat dilihat di bawah ini. (1) Dokumen Pendukung merupakan dokumen yang digunakan untuk mendukung informasi yang telah ada dan belum ada pada penelitian ini. Dokumen pendukung terdiri dari, IMB, izin operasional, sertifikasi tanah, profil, UPL, denah bangunan, dokumen sarpras, daftar inventaris, data alkes, daftar SDM, struktur organisasi, dan SK struktur organisasi. (2) Studi literatur diperlukan untuk membantu penulis menyelesaikan permasalahan yang terdapat pada perancangan puskesmas dengan berbagai referensi dan teori yang relevan.

2.4. Pengolahan Data

Tahap selanjutnya adalah melakukan pengolahan data, berdasarkan data yang telah diperoleh. Berikut merupakan tahap pengolahan data yang dijabarkan di bawah ini.

- **Tata ruangan bangunan**
Pada tata ruangan bangunan terdapat 2 koefisien yang dilakukan pengukuran yaitu: (1) Koefisien Dasar Bangunan (KDB), pada puskesmas KDB maksimal adalah 60% dari total lahan yang dimiliki. Cara mengukur KDB adalah dengan cara membagi total luas lahan dengan total luas bangunan kemudian dikali 100%. (2) Koefisien Lantai Bangunan (KLB), pada puskesmas KLB maksimal adalah 1,8. Cara mengukur KLB yaitu luas seluruh lantai kemudian dibagi dengan luas lahan.
- **Sistem Penghawaan**
Pada sistem penghawaan dilakukan perhitungan ACH untuk mengetahui besarnya pertukaran udara, dengan standar minimal 12x pertukaran per jam.
- **Sistem pencahayaan**

Pada sistem pencahayaan dilakukan perhitungan besarnya tingkat pencahayaan dengan satuan *lux*.

2.5. Studi Kelayakan

Pada tahap studi kelayakan dilakukan pengukuran dan penilaian kelayakan pada setiap aspek dan kriteria yang terdapat pada UPT Puskesmas Z. pada studi kelayakan terdapat 2 (dua) langkah yaitu:

- Perancangan Puskesmas
Berdasarkan data yang telah diperoleh, maka diketahui proses pada perancangan puskesmas. Perancangan puskesmas dilakukan berdasarkan kriteria pada Permenkes No. 75 tahun 2014. Kriteria-kriteria pada setiap aspek tersebut menghasilkan puskesmas yang layak dipergunakan untuk kegiatan operasional. Aspek-aspek tersebut terdiri dari aspek lokasi, bangunan, sarana dan prasarana, alat-alat kesehatan, ketenagaan, dan organisasi.
- Analisis Kesesuaian Puskesmas dan Perancangan
Analisis kesesuaian puskesmas dan perancangan dilakukan dengan menilai kesesuaian pada puskesmas yang ada dengan Permenkes No. 75 tahun 2014 yang telah direalisasikan pada perancangan puskesmas. Aspek studi kelayakan yang dianalisis adalah aspek lokasi, bangunan, sarana dan prasarana, alat-alat kesehatan, ketenagaan, dan organisasi.

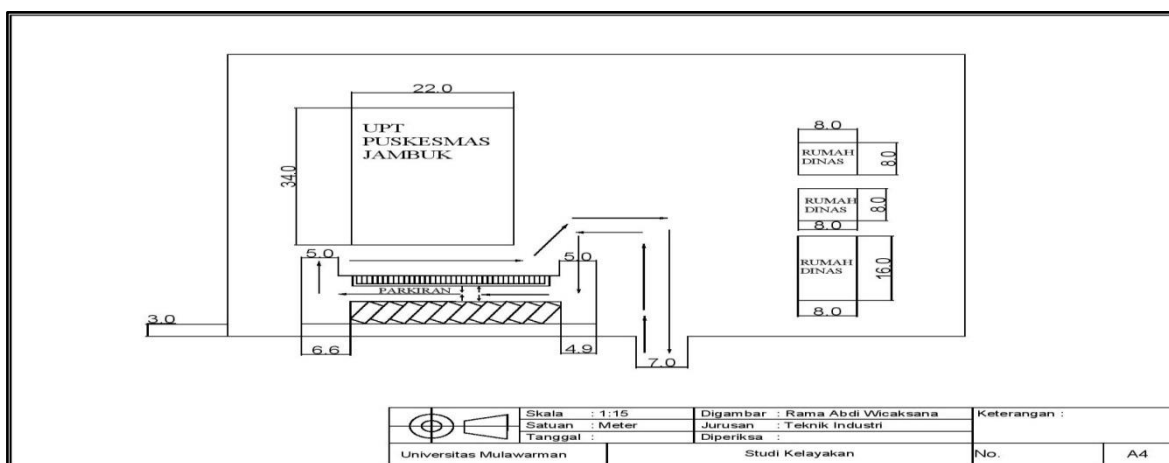
3. Analisis dan Pembahasan

Menurut Sumanto dan Sundari (2016)^[7] dalam menetapkan pantas atau tidaknya suatu objek dapat dinilai dari berbagai aspek. Adapun setiap aspek bisa dinyatakan pantas harus memiliki suatu standar nilai tertentu, namun standar penentuan nilai tidak hanya dilakukan pada satu aspek saja melainkan perlu melihat dari seluruh aspek yang ingin dinilai. Pada studi kelayakan terdapat 2 (dua) tahap yaitu, perancangan puskesmas dan analisis kesesuaian bangunan dengan perancangan. Berikut merupakan penjabaran setiap tahapan.

3.1. Perancangan Puskesmas

UPT Puskesmas Z menempati lahan seluas 7000m², dengan memiliki izin bangunan pada lahan yang tersedia. Berikut merupakan tahap perancangan puskesmas.

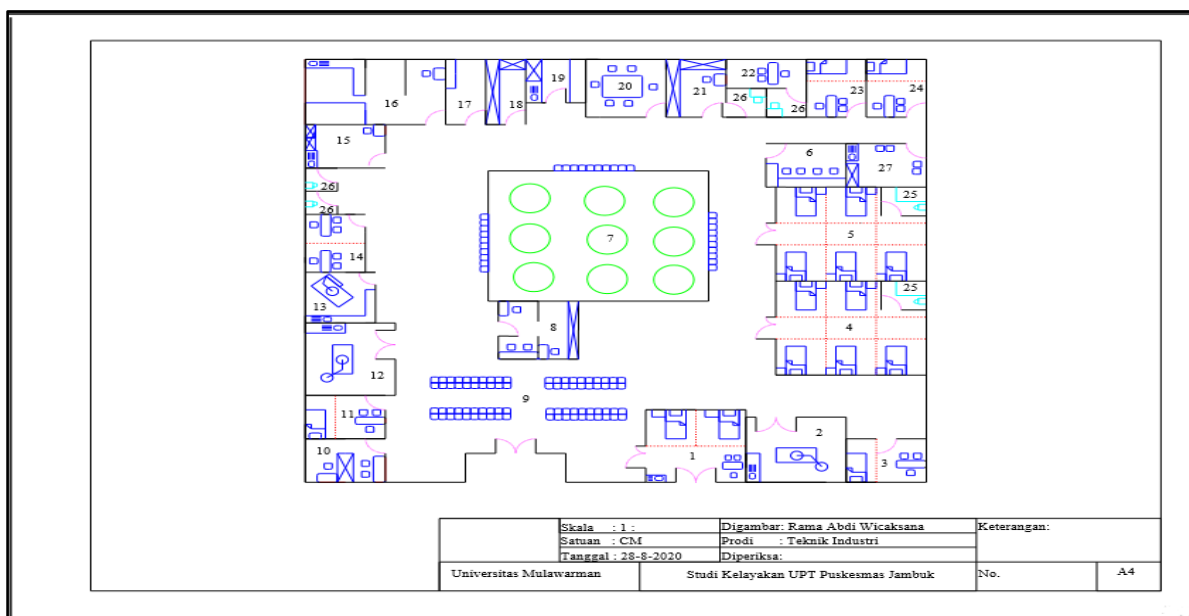
- Aspek Lokasi
Menurut Soeharto (2002)^[8] Aspek lokasi adalah aspek yang meneliti teta letak geografis yang berasal dari sumber potensial, serta hubungan dampaknya terhadap adanya berbagai usaha. Pada aspek lokasi pertimbangan yang dilakukan dengan menilai kriteria-kriteria lokasi, seperti kriteria akses jalur transportasi, geografis, perlengkapan dan peralatan parker, kontur tanah, fasilitas kemandan, keadaan, pengendalian kesehatan lingkungan, serta ketersediaan utilitas publik. Setelah dilakukan perancangan terhadap seluruh kriteria yang ada, maka diketahui layout keseluruhan lahan pada perancangan puskesmas dengan mempertimbangkan kriter untuk lahan yang ada. Berikut merupakan gambar rancangan layout keseluruhan UPT Puskesmas Z yang berpedon **Z** urnal Pambudi (2015)^[9] yang dapat dilihat pada gambar 1.



Gambar 1. Layout Rancangan Keseluruhan Lahan UPT Puskesmas Z

- Aspek Bangunan

Pada aspek bangunan, dilakukan perancangan *layout* dan tata letak peralatan pada setiap ruangan secara menyeluruh. Standar yang digunakan pada proses perancangan *layout* bangunan adalah Permenkes No. 75 tahun 2014 yang tercantum dalam Pedoman Teknis Kementerian Kesehatan (2013)^[10]. Berikut merupakan *layout* bangunan UPT Puskesmas Z pada Gambar 2.



Gambar 2. *Layout* Rancangan Bangunan UPT Puskesmas Z

- Aspek Sarana dan Prasarana

Perancangan sarana dan prasarana dilakukan dengan melakukan pertimbangan pada setiap sistem yang terdapat di puskesmas. Sistem yang dimaksud seperti, sistem ventilasi, sanitasi, listrik, komunikasi, gas medik, pelindung petir, penerangan, pelindung kebakaran, pengendali kebisingan, dan transportasi vertical dalam puskesmas. Semua kriteria tersebut mengikuti standar pada Permenkes No. 75 tahun 2014.

- Aspek Peralatan Kesehatan

Peralatan kesehatan merupakan aspek penting dalam upaya menunjang pelayanan kesehatan masyarakat. Semua peralatan kesehatan yang ada diatur dalam Permenkes nomor 75 tahun 2014 tentang puskesmas. Oleh karena itu, puskesmas harus bisa memenuhi standar minimal yang telah ditetapkan. Penetapan peralatan kesehatan diatur pada setiap ruangan yang ada di puskesmas serta kegiatan yang ada di luar puskesmas. Perancangan dilakukan dengan mengadakan peralatan kesehatan yang belum dimiliki oleh UPT Puskesmas Z.

- Aspek Ketenagaan

Aspek ketenagaan adalah aspek yang meneliti tentang tenaga kesehatan yang ada pada UPT Puskesmas Z. Tenaga kesehatan dan non kesehatan merupakan bagian dari sumber daya manusia yang ada pada puskesmas. Untuk menghitung jenis dan jumlah tenaga kesehatan dan non kesehatan dilakukan kegiatan analisis beban kerja dengan memperhitungkan jumlah penyelenggaraan pelayanan yang ada, jumlah persebaran penduduk, karakteristik wilayah kerja, penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan tingkat pertama, luas wilayah kerja, dan penetapan waktu kerja. Berikut jumlah dan jenis tenaga kerja yang harus dipenuhi berdasarkan Permenkes nomor 75 tahun 2014 berdasarkan pada data kepadatan penduduk kecamatan x menurut Sofyan (2017)^[11] yang dapat dilihat pada Tabel 1.

Tabel 1. Jumlah minimal ketenagaan

No.	Jenis Tenaga Kerja	Standar Minimal
1.	Dokter atau dokter layanan primer	1
2.	Dokter gigi	1
3.	Perawat	5
4.	Bidan	4
5.	Tenaga Kesehatan Masyarakat	1
6.	Tenaga kesehatan lingkungan	1
7.	Ahli teknologi laboratorium medic	1
8.	Tenaga gizi	1
9.	Tenaga kefarmasian	1
10.	Tenaga administrasi	2
11.	Pekarya	1

- Aspek Organisasi

Dinas kesehatan bertugas menyusun organisasi puskesmas berdasarkan kategori usaha kesehatan dan beban kerja pada puskesmas. Berikut struktur organisasi minimal yang harus dimiliki puskesmas berdasarkan Permenkes nomor 75 tahun 2014 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat yaitu, ketua puskesmas, ketua sub bagian tata usaha, penanggung jawab UKM bagian pengembangan, penanggung jawab UKM dan keperawatan bagian kesehatan masyarakat, penanggung jawab UKP, kefarmasian dan laboratorium, dan penanggung jawab bagian sistem jaringan layanan puskesmas serta fasilitas layanan kesehatan.

3.2. Analisis Kesesuaian Puskesmas dan Perancangan

Analisis yang dilakukan berupa analisis kesesuaian antara kondisi yang terdapat pada UPT Puskesmas Z dengan Permenkes No. 75 tahun 2014 yang telah direalisasikan pada perancangan puskesmas.

- Aspek Lokasi

Pada aspek lokasi UPT Puskesmas Z dapat memenuhi 6 (enam) dari 8 (delapan) kriteria yang ada pada Permenkes nomor 75 tahun 2014 tentang puskesmas. Kriteria-kriteria yang terpenuhi yaitu geografis, kontur tanah, aksesibilitas jalur transportasi, utilitas masyarakat, pengendalian kesehatan lingkungan dan kondisi lainnya. Sedangkan pada kriteria fasilitas keamanan dan fasilitas parkir UPT Puskesmas Z belum memenuhi standar yang ada sehingga harus dilakukan perbaikan dan pengadaan fasilitas yang diajukan kepada dinas terkait.

- Aspek Bangunan

Pada aspek bangunan UPT Puskesmas Z dapat memenuhi 4 (empat) dari 6 (enam) kriteria yang ada pada Permenkes nomor 75 tahun 2014 tentang puskesmas. Kriteria-kriteria yang terpenuhi yaitu tata ruang, desain bangunan, komponen dan material bangunan dan struktur bangunan. Sedangkan pada kriteria ruang dan lambang belum memenuhi standar yang ada. Pada kriteria ruang UPT Puskesmas Z masih belum memiliki ruangan promosi kesehatan dan pada lambang UPT Puskesmas Z meskipun penempatannya sudah sesuai standar tapi lambang yang ada sudah tidak bagus dan harus diganti dengan yang baru.

- Aspek Sarana dan Prasarana

Pada aspek bangunan UPT Puskesmas Z dapat memenuhi 6 (enam) dari 10 (sepuluh) kriteria yang ada pada Permenkes nomor 75 tahun 2014 tentang puskesmas. Kriteria-kriteria yang terpenuhi yaitu sistem penghawaan, sistem kelistrikan, sistem sanitasi, sistem gas medik, sistem pengendali kebisingan dan sistem transportasi *vertical*. Sedangkan pada 4 (empat) kriteria yang belum memenuhi standar yaitu sistem komunikasi, sistem pencahayaan, sistem proteksi petir, dan sistem proteksi kebakaran. Pada sistem komunikasi UPT Puskesmas Z harus menyediakan alat radio maupun telepon kabel untuk komunikasi darurat. Pada sistem pencahayaan UPT Puskesmas Z belum menggunakan lampu yang memenuhi standar sehingga harus diganti dengan lampu yang sudah direkomendasikan. Pada sistem proteksi petir UPT Puskesmas Z harus mengadakan sistem proteksi petir yang berguna untuk melindungi orang-orang yang berada didalam puskesmas. Pada sistem proteksi kebakaran UPT Puskesmas Z sudah memiliki APAR, namun pada ruangan generator tidak terdapat alat pemadam kebakaran jenis CO₂.

- Aspek Peralatan

Pada aspek peralatan kesehatan UPT Puskesmas Z hanya memenuhi 22% jumlah peralatan kesehatan dari standar yang telah ditetapkan Permenkes nomor 75 tahun 2014 tentang puskesmas pada setiap ruangnya. Semua peralatan kesehatan yang perlu dilakukan pengadaan dapat dilihat pada lampiran 1 data peralatan kesehatan.

- Aspek Ketenagaan

Pada aspek ketenagaan UPT Puskesmas Z dapat memenuhi 8 (delapan) dari 11 (sebelas) tenaga kerja yang ada pada Permenkes nomor 75 tahun 2014 tentang puskesmas. UPT Puskesmas Z belum memiliki 3 (tiga) tenaga kerja yaitu dokter pelayanan primer, dokter gigi, dan tenaga gizi. UPT Puskesmas Z harus mengajukan permohonan penambahan tenaga kerja kepada dinas terkait agar dapat memenuhi standar yang ada.

- Aspek Organisasi

Pada aspek organisasi UPT Puskesmas Z dapat memenuhi standar studi kelayakan yang ada pada Permenkes nomor 75 tahun 2014 tentang puskesmas.

4. Kesimpulan

Studi kelayakan yang dilakukan dengan meneliti 6 aspek studi kelayakan berdasarkan Permenkes nomor 75 tahun 2014 tentang Puskesmas di UPT Puskesmas Z maka dapat diputuskan bahwa UPT Puskesmas Z memenuhi 16.7% standar studi kelayakan yang telah ditetapkan atau dengan kata lain UPT Puskesmas Z hanya mampu memenuhi 1 aspek studi kelayakan yaitu aspek organisasi. Sedangkan pada 5 aspek lainnya UPT Puskesmas Z belum memenuhi studi kelayakan sehingga UPT Puskesmas Z harus melakukan pengadaan maupun perbaikan. Kemudian, rekomendasi perbaikan yang perlu dilakukan oleh UPT Puskesmas Z yaitu terdapat pada aspek lokasi, aspek peralatan kesehatan, dan aspek ketenagaan.

Saran yang bisa disampaikan berdasarkan hasil penelitian ini adalah melakukan evaluasi secara berkala terhadap kegiatan operasional dan fasilitas-fasilitas yang ada pada UPT Puskesmas Z agar standar kelayakan dari UPT Puskesmas Z tidak mengalami penurunan. UPT Puskesmas Z harus segera melakukan pengadaan dan perbaikan pada fasilitas dan SDM. Berikut merupakan prioritas pengerjaan perbaikan pada UPT Puskesmas Z dinilai dari kemudahan perbaikannya yaitu perbaikan sistem pencahayaan, perbaikan lambang puskesmas, penambahan ruangan promosi kesehatan, pengadaan fasilitas parkir, pengadaan peralatan kesehatan dan pengadaan dokter yang kurang.

Referensi

- [1] Irmawati, Sri., dkk. (2017). "Kualitas Pelayanan Kesehatan di Sanggurura Kecamatan Tatanga Kota Palu". *e Jurnal Katalogis*, Volume V (1), Januari 2017. ISSN: 2302-2019.
- [2] Juwiring. (2017). "Analisis Kebutuhan Pendirian Puskesmas Dan Pertimbangan Tata Ruang Daerah Dalam Pendirian Puskesmas". Jawa Tengah: *Academia.edu*.
- [3] Puskesmas Juwiring., (2017). "Analisis Kebutuhan Pendirian Puskesmas Dan Pertimbangan Tata Ruang Daerah Dalam Pendirian Puskesmas". Jawa Tengah: *Academia.edu*.
- [4] Sardjoko, Subandi. (2018). "Penguatan Pelayanan Kesehatan Dasar Di Puskesmas". Jakarta: *Direktorat Kesehatan dan Gizi Masyarakat*.
- [5] Kesehatan, Kementrian. (2014). "Permenkes No. 75 Tahun 2014". Jakarta; Yankes.aspak.kemkes.go.id.
- [6] Suratman. (2001). "Studi Kelayakan Proyek: Teknik dan Prosedur Penyusunan Laporan". Yogyakarta: Penerbit J&J Learning.
- [7] Sumanto., dan Sundari. (2016). "Analisis Kelayakan Usaha Particle Board Sebagai Pemanfaatan Limbah Kayu (Studi Kasus : CV. Riau Pallet)". Riau: Vol 2 (1).
- [8] Soeharto. (2002). "Studi Kelayakan Proyek Industri". Jakarta: Penerbit Erlangga.
- [9] Pambudi. (2015). "Analisa Ruang Parkir Kendaraan Pada Rumah Sakit Umum Daerah Jemderal Ahmad Yani Kota Metro". *Jurnal Tapak*, Volume 5 (1), November 2015. ISSN 2089-2098.
- [10] Kesehatan, Kementrian. (2013). "Pedoman Teknis : Bangunan Dan Prasarana Puskesmas". Jakarta: Kemkes.go.id.
- [11] Sofyan, Achmad. (2017). "Profil Daerah. Kutai Barat: BP3D Kutai Barat".